

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang, Kabupaten Kendal

Halaman 1 dan 7

RSUD Ketileng Rp 34 M, RSUD Kendal Rp 13 M

Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan

SEMARANG - Pelayanan RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang dipastikan tidak akan berkurang meski BPJS Kesehatan menunggak utang kepada rumah sakit pelat merah tersebut mencapai Rp

34 miliar. Tunggakan itu terhitung mulai Januari 2018 hingga Selasa (25/9) kemarin.

Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro atau RSUD Ketileng Semarang, Susi Herawati, mengatakan, jika pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat ▶ Baca **RSUD...** hal 7

Sambungan dari hal.1

sesuai dengan prosedur yang ada, dan tetap melayani pasien BPJS Kesehatan, meski jumlah utang yang belum dibayar saat ini sangat besar.

"Kami tetap melayani sesuai dengan prosedur, mutu sesuai dengan pedoman yang ada," katanya kepada *Jawa Pos Radar Semarang*, Selasa (25/9).

Meski begitu, sejumlah pembangunan dan inovasi yang direncanakan oleh pihak rumah sakit harus ditunda, semi efisiensi anggaran dan terpaksa harus mengambil uang operasional rumah sakit untuk membayar biaya operasional bulanan. "Saat ini kita pakai uang Silpa atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, untuk melakukan efisiensi, dan menunda kegiatan rumah sakit seperti pembangunan dan lainnya," jelasnya.

Biaya operasional yang harus dikeluarkan, lanjut Susi, di antaranya pembayaran obat, makanan pasien, air, listrik dan telepon demi menunjang layanan pasien yang memang diprioritaskan. Ia mengaku jika tunggakan dari BPJS Kesehatan sendiri, sedikit banyak mengganggu program rumah sakit. "Misalnya bayar apapun juga mundur, kalau ada kerusakan juga nggak bisa langsung diper-

baiki. Prioritas utamanya adalah pengobatan dan pelayanan pasien yang tidak boleh ditunda," keluhnya.

Pihaknya berharap agar bulan ini semua tunggakan bisa terbayarkan dengan tujuan agar bulan Oktober nanti pihak rumah sakit bisa melakukan belanja operasional. Selain itu juga untuk menentukan pendapatan yang didapatkan rumah sakit sesuai yang dicanangkan pemerintah. "Kalau belum dibayar, kami akan cari jalan lain, bisa pinjam bank atau melalui kebijakan Wali Kota Semarang. Intinya sesuai komitmen Pak Wali, agar jangan sampai masyarakat terkendala masalah kesehatan," tegasnya.

Disebutkan, tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Ketileng pada Juni mencapai Rp 11 miliar dan Juli Rp 14 miliar. Sedangkan tunggakan dari Januari sampai Mei mencapai Rp 34 miliar. "Tentu kami sangat menyangkan, kami selalu bersurat ke BPJS Kesehatan terkait pembayaran utang. Namun memang di sana tidak ada uang. Kami tetap menunggu BPJS untuk membayar, ini kita koordinasikan," tambah Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang, Sutrisno.

Pihak rumah sakit juga mengeluhkan kebijakan BPJS Kese-

hatan yang menerapkan aturan pelayanan rujukan berjenjang. Peraturan tersebut dinilai tidak efektif dan merugikan para peserta BPJS yang ingin melakukan pelayanan kesehatan. Bahkan secara tidak langsung aturan tersebut membuat angka pasien rawat jalan mengalami penurunan. "Sebelum aturan diberlakukan mencapai 1.000 pasien lebih per hari, saat ini hanya sekitar 300 pasien, sejak Mei lalu. Selain itu, sistem rujukan online sudah dilakukan, namun yang menjadi masalah saat masyarakat datang dengan penyakitnya harus turun ke bawah, yaitu ke tipe rumah sakit di bawah kita," jelas Sutrisno.

Nasib serupa dialami RSUD dr H Soewondo Kendal. Total tunggakan klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit ini mencapai Rp 13 miliar. Tunggakan klaim itu untuk dua bulan terakhir. Yaitu Mei dan Juni 2018.

"Klaim yang belum dibayar untuk bulan Mei sebesar Rp 7,4 miliar dan Juni Rp 5,6 miliar. Sedangkan untuk Juli dan Agustus masih dalam proses verifikasi, karena proses verifikasi biasanya tiga bulan," kata Humas RSUD dr Soewondo Kendal dr Muhammad Wibowo, kemarin (25/9).

Diakuinya, keterlambatan klaim ini terjadi mulai awal 2018. Padahal tahun-tahun sebelumnya

tidak ada masalah dengan sistem pencarian satu bulan bisa langsung cair. Sehingga tidak begitu membebani rumah sakit. Selain keterlambatan pembayaran klaim, juga keterlambatan klaim obat kronis sejak Agustus 2017. Keterlambatan ini karena kendala sistem. "Yakni jika per bulan rata-rata sekitar Rp 230 juta lebih, maka setahun klaim obat kronis sekitar Rp 2,5 miliar yang belum terbayarkan," jelasnya.

Akibat keterlambatan pembayaran klaim ini berpengaruh terhadap pengaturan keuangan di RSUD dr Soewondo. Meskipun BPJS Kesehatan tetap dilayani seperti biasa. "Kami melakukan efisiensi belanja atau pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting. Jadi pengeluaran untuk hal penting dan mendasak," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kendal Peni Suryanti tak menampiknya. Ia mengaku memang BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan dengan RSUD dr Soewondo Kendal. "Saya tidak bisa memberikan informasi besarnya tunggakan, harus seizin dari BPJS Kesehatan Kanwil Jateng. Namun memang benar kami masih menunggak di rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan di Kendal," jelasnya. (den/bud/aro)